



## Peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

**Its'naini Iflachatun Azkiya\*, Hendra Dedi Kriswanto**

Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

\*email Koresponden Penulis: [itsnainiazkiya@students.unnes.ac.id](mailto:itsnainiazkiya@students.unnes.ac.id)

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

**Diajukan:** 2024-05-24

**Diterima:** 2024-07-08

**Diterbitkan:** 2024-08-05



**Lisensi:** cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

### ABSTRAK

*Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama pembangunan daerah dan nasional, yang memerlukan pembangunan yang menyeluruh dan melibatkan partisipasi masyarakat. Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. LPMK Kelurahan Candi sempat vakum, namun kembali aktif dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur partisipasi masyarakat setelah LPMK aktif kembali, serta peran dan faktor pendukung serta penghambat LPMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan informan penelitian yaitu ketua LPMK, 2 anggota LPMK dan 1 masyarakat umum. Data dikumpulkan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat termasuk dalam partisipasi sedang/Degrees of tekonomism pada tangga Peredaman (Placation). Peran LPMK sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator sudah berjalan dengan baik. Faktor pendukung yaitu pola kepemimpinan ketua, anggota LPMK yang solid, bantuan dari mitra. Faktor penghambat yaitu dana dan ada beberapa orang yang tidak sejalan dengan LPMK.*

**Kata Kunci:** partisipasi; peran; LPMK

### Cara mensitasi artikel:

Azkiya, I. I., & Kriswanto, H. D. (2024). Peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(4), 724-739. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i4.22088>

## PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 mempertimbangkan tiga isu utama yang perlu diperhatikan. Pertama, jebakan pendapatan rendah merujuk pada pembangunan ekonomi Indonesia dengan tingkat produktivitas yang rendah. Pembangunan ekonomi menjadi bagian dari pembangunan nasional karena dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sayangnya, tidak semua Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat terserap pada perekonomian sehingga masih ada masyarakat yang pendapatan dan kesejahteraannya rendah. Kedua, pembangunan sosial yang

masih tertinggal ditandai dengan penurunan angka kemiskinan yang melambat, perlindungan sosial yang belum maksimal, kurangnya partisipasi masyarakat, kualitas pendidikan rendah, dan rendahnya sistem kesehatan. Ketiga, birokrasi pemerintahan dengan kualitas regulasi yang masih rendah sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan belum optimal. Ketiga isu tersebut akan mempengaruhi perencanaan pembangunan hingga tingkat daerah (Hidayat *et al.*, 2022)

Semarang memiliki lima masalah utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Pertama, sumber daya manusia yang masih rendah dalam hal kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan daya saing kerja. Kedua, potensi ekonomi lokal yang belum mampu bersaing. Ketiga, tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Keempat, pemanfaatan ruang dan lingkungan yang belum optimal. Kelima, perbaikan tata kelola pemerintahan agar pelaksanaan pembangunan lebih optimal. Dari masalah yang ada, kesejahteraan masyarakat menjadi poin penting yang sangat diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sehingga menjadi tujuan utama bagi Pembangunan Nasional (Parida & Emei, 2019). Masalah tersebut mendorong pemerintah untuk memberikan upaya penanganan melalui pembangunan nasional dengan tujuan menjadikan masyarakat yang sejahtera. Seperti yang tertulis dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 bahwa tujuan pembangunan bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia (Ranjamandu, 2019). Maka dilaksanakan Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan pembangunan negara Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruhnya serta melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan (Damaiwana, 2020)

Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembangunan adalah dengan memberikan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga terciptanya pembangunan secara menyeluruh (Arief Rahman, 2021). Pemerintah kelurahan/desa diberi kewenangan menjalankan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang bertujuan untuk mempermudah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Adet *et al.*, 2023). Keberhasilan pembangunan di kelurahan/desa akan memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional (Muarifuddin, 2017).

LPMK memiliki tugas untuk membantu lurah dalam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Tugas LPMK yaitu menjadi motivator bagi masyarakat, inspirator pembangunan, mediator antara pemerintah dengan masyarakat, dan aspirator masyarakat (Rauf & Munaf, 2018). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menjadi tempat untuk menampung aspirasi masyarakat dan mewujudkannya sesuai kebutuhan masyarakat serta menyusun rencana pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat (Isyabillilah & Gustaman, 2023).

Pembangunan desa/kelurahan tidak bisa terlepas dari partisipasi masyarakat itu sendiri (Kaehe *et al.*, 2019). Partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah menjadi alat pemberdayaan karena berperan sebagai akar yang menjadi gagasan pemberdayaan (Uddin, 2019). Partisipasi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur agar suatu daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang cerdas karena menggabungkan pengembangan wilayah dengan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi (Felix Júnior *et al.*, 2020). Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi, yang bermuara pada pembangunan yang efektif (Masri *et al.*, 2023).

Uraian di atas menjelaskan bahwa adanya keterkaitan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan partisipasi masyarakat. Lembaga Pemberdayaan masyarakat memiliki peran yang besar dalam mewadahi aspirasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Maka, antara LPMK dan masyarakat adalah satu kesatuan yang menguntungkan apabila berjalan berdampingan.

Kelurahan Candi memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. LPMK kelurahan Candi mengalami vakum bertahun-tahun, tetapi aktif kembali pada tahun 2023 setelah pemilihan ketua baru. Tantangan bagi LPMK baru adalah meningkatkan partisipasi masyarakat yang menurun akibat vakum tersebut. LPMK baru berupaya merangkul masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan mereka, dengan fokus tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap kegiatan.

Berdasarkan uraian dan masalah tersebut peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Kelurahan Candi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang berasal dari perspektif narasumber atau informan dari masalah sosial yang mereka alami (Creswell, 2015). Desain penelitian deskriptif menguraikan peristiwa yang menjadi fokus penelitian dalam bentuk narasi untuk memahami sejauh mana partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan peran apa yang dilakukan LPMK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa ada perantara (Sugiyono, 2019). Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung bersama ketua beserta pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) kelurahan Candi dan masyarakat kelurahan Candi. Informan ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu memilih informan yang dianggap paling tahu tentang masalah yang diteliti (Douglas, 2022). Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber

data sekunder berupa dokumen yang meliputi dokumen resmi, pribadi, fisik, serta arsip (Ulfatin, 2022). Data sekunder yang digunakan berupa buku-buku dan jurnal mengenai partisipasi masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini, data kependudukan, program kerja LPMK, dan gambar.

Teknik pengumpulan data sebagai langkah utama peneliti dalam memperoleh data untuk dianalisis dan disimpulkan (Salmia, Sukmawati, 2023). Data di penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. wawancara dengan ketua LPMK, anggota LPMK dan masyarakat Kelurahan Candi. Observasi dilakukan dengan mengikuti kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan LPMK. Dokumentasi dengan data tertulis dari artikel, buku, dan dokumen Kelurahan Candi.

Teknik keabsahan data digunakan untuk mengukur ketepatan dan menguji kebenaran suatu data. Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan validitas dan reliabilitas (Zuldafrial, 2012). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji data. Triangulasi sumber mengecek dan mencocokkan data yang dihasilkan dari beberapa sumber terkait. Triangulasi teknik membandingkan informasi dengan cara yang berbeda seperti wawancara dan observasi.

Teknik analisis data menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam beberapa bentuk, memasukkan ke dalam kategori umum dan khusus, dan menyimpulkan sehingga mudah dipahami (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Langkah analisis data pada penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah Kelurahan Candi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh mitra lurah yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Pembentukan LPMK diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Pasal 10. Sesuai dalam peraturan tersebut bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dibentuk oleh warga untuk membantu Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkan swadaya masyarakat dalam pembangunan. LPMK Kelurahan Candi sempat mengalami vakum selama beberapa tahun dan bangkit lagi pada tahun 2023 di periode kepengurusan baru yang diketuai oleh pak Panji. Memulai kembali periode baru dengan mengajak masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengambil peran sebagai koordinator lembaga kemasyarakatan di Kelurahan.

Partisipasi masyarakat di kelurahan sangat penting untuk pengembangan dan keberlanjutan wilayah. Banyak penelitian dari berbagai topik yang menekankan peran masyarakat dalam pengambilan keputusan yang demokratis dalam berbagai bidang seperti perencanaan kota, kemajuan desa, implementasi kebijakan, pemantauan hingga evaluasi, yang pada akhirnya mengarah pada

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Heffernan, 2022). Partisipasi masyarakat merupakan proses strategis yang sangat potensial dalam mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kekuatan ekonomi, sosial, transformasi budaya dan memberdayakan masyarakat lokal di desa (Mulyono, 2017).

Tangga partisipasi Arnstein adalah sebuah langkah untuk memahami tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menggunakan tangga ini dapat membantu menilai dan meningkatkan keterlibatan masyarakat di berbagai sektor. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat maka masyarakat dapat bekerja untuk menciptakan pendekatan yang lebih demokratis untuk mengambil keputusan dan mengarah pada upaya pembangunan dan pelestarian berkelanjutan (Gaber, 2019). Tangga partisipasi Arnstein memiliki delapan anak tangga yang terbagi menjadi tiga level partisipasi. Tiap tangga dibedakan sesuai dengan tingkat kekuasaan warga dalam menentukan rencana suatu program (Arnstein, 1969) (Chawa et al., 2023).

Level pertama dalam tangga partisipasi Arnstein adalah Partisipasi Rendah/*Non-participation*. Level ini memiliki dua tangga yaitu Manipulasi (*Manipulation*) dan Terapi (*Therapy*). Tangga pertama, tidak bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, partisipasi masyarakat hanya sebuah manipulasi pemerintah untuk memperoleh dukungan publik dengan adanya kesan telah adanya partisipasi (Suryani et al., 2021). Tangga kedua, pemerintah berpura-pura melibatkan masyarakat untuk mengubah pola pikir mereka (Tampubolon et al., 2023).

Berdasarkan temuan di lapangan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Candi dalam melaksanakan tugasnya sebagai mitra Lurah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan program. LPMK mengadakan pertemuan rutin bersama masyarakat setiap tiga bulan, tiga bulan pertama bersama RW dilanjut tiga bulan setelahnya bersama RT. Pertemuan ini bertujuan untuk memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dalam forum ini, masyarakat menyampaikan masukan mengenai masalah dan program yang diinginkan. Perlu dicatat bahwa partisipasi masyarakat terbatas pada perwakilan masyarakat saja yang mana diwakilkan oleh ketua RW dan ketua RT. Sejalan dengan yang hasil penelitian Aprilia & Suharno (2023) bahwa wujud partisipasi masyarakat bisa dilihat dari ikut memberikan usulan, hadir dalam proses perencanaan dan berdiskusi. Jadi partisipasi masyarakat dalam perencanaan program tidak pada tingkat ini.



**Gambar 1.** Pertemuan LPMK, RW, RT

Level kedua dalam tangga partisipasi Arstein adalah Partisipasi Sedang/*Degrees of tekonism*. Pada level ini, ada usaha melibatkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, masyarakat tidak dapat memastikan bahwa aspirasi itu akan direalisasikan karena keputusan ada di tangan pemegang kekuasaan (Dewi *et al.*, 2019). Level ini memiliki 3 tangga yaitu Informasi (*Information*), Konsultasi (*Consultation*), dan Peredaman (*Placation*). Informasi, terjadi komunikasi yang lebih intensif, tetapi hanya berlangsung satu arah dari LPMK ke masyarakat tanpa adanya umpan balik dari masyarakat ke LPMK. Konsultasi, komunikasi telah berlangsung dua arah dengan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpendapat melalui survei warga, kehadiran dalam rapat, dan serap aspirasi publik. Meski demikian, tidak dapat dipastikan pendapat tersebut akan dipertimbangkan dan memberikan perubahan pada sebuah keputusan karena keputusan ditetapkan oleh pemerintah. Peredaman, komunikasi dua arah sudah berjalan dengan baik. Aspirasi masyarakat memberikan pengaruh terhadap penetapan kebijakan. Namun, keputusan tetap ada di tangan pemegang kekuasaan (Nisa *et al.*, 2022).

Fakta di lapangan ditemukan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Candi memberikan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan minimal tujuh hari sebelum kegiatan berlangsung. LPMK kelurahan Candi memberikan waktu yang cukup bagi warga untuk mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Penggunaan *Whatsapps Group* yang melibatkan ketua RW dan RT adalah cara untuk memastikan informasi dapat disebarkan secara efektif ke masyarakat. Informasi diberikan dalam bentuk *soft file* undangan dan *flayer* untuk memberikan informasi tertulis kepada masyarakat. *Door to door* juga dilakukan untuk memastikan bahwa warga yang tidak aktif media sosial atau tidak memiliki akses informasi online juga dapat mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang akan datang. Melalui media pemberian informasi ini pertukaran informasi lebih mudah dan masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya agar lebih memahami kegiatan yang akan dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Hamdani (2020), bahwa pemberian informasi bisa dilakukan melalui sosialisasi, media massa, pamflet dan pertemuan. Pada proses pemberian informasi ini partisipasi masyarakat terbatas pada

memberikan masukan atau pendapat, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Candi menjalankan fungsinya sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan melalui kegiatan kemasyarakatan. Masyarakat diikutkan dalam mengisi posisi strategis dalam kepengurusan LPMK guna memberikan akses kepada masyarakat dalam memberikan saran dan merencanakan kegiatan. Melalui kegiatan yang ada masyarakat dipersilahkan untuk menyampaikan aspirasinya. LPMK menerima aspirasi tersebut dan memahami tantangan dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat lalu memilah dan mendahulukan program yang dibutuhkan dalam waktu dekat. Keputusan akhir tetap ada pada LPMK setelah mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan koordinasi dengan pihak pemerintah desa. Ini membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan berbagai faktor dan kepentingan yang ada, sehingga memungkinkan tercapainya hasil yang lebih baik dan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat.

Temuan lapangan ini sejalan dengan hasil penelitian Cahyono & Mufidayati (2021). Bahwa dalam perencanaan APBDes masyarakat dipersilahkan memberikan usulan melalui Musrenbangdes. Usulan tersebut dipilih dan direkap sesuai dengan skala prioritas kebutuhan desa dan ditetapkan oleh pemerintah desa. Peserta yang hadir adalah perwakilan masyarakat yaitu ketua Rukun Warga dan Rukun Tetangga.

Level ketiga adalah Partisipasi Tinggi/*Degrees of citizen power* adalah level tertinggi pada tangga partisipasi Arnstein. Pada level ini masyarakat dan pemerintah menjadi rekan kerja sehingga masyarakat diberi ruang dalam pengambilan kebijakan dalam proses perencanaan hingga evaluasi (Hamdani, 2020). Masyarakat mengalami peningkatan kemampuan sehingga memiliki kekuasaan sepenuhnya untuk melaksanakan suatu program dan mengambil keputusan (Setiawan *et al.*, 2020).

LPMK Kelurahan Candi dalam mengadakan kegiatan memiliki peran utama sebagai perencana dan pelaksanaan. Masyarakat lebih berperan sebagai peserta kegiatan dan pemberi aspirasi. Namun, pada acara-acara rutin di tingkat RT atau RW, masyarakat memiliki peran yang lebih aktif dengan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan. LPMK hanya berperan sebagai tamu undangan atau pihak yang memberikan dukungan dalam hal dana atau sumber daya lainnya. Hal itu membuat LPMK lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pada kegiatan yang lebih besar dan memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam tingkat yang lebih dekat dengan mereka.

Melalui tangga partisipasi Arnstein dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang diadakan LPMK berada pada level Partisipasi Sedang/*Degrees of tekonism* di tangga Peredaman (*Placation*). Untuk mencapai tingkat ini tentu LPMK memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan yang diadakan LPMK.

Ralph Linton berpendapat bahwa peran dapat diartikan sebagai bentuk tingkah laku menyesuaikan diri dengan keadaan di dalam status atau jabatan.

Seorang yang menduduki status atau jabatan tertentu harus bertingkah laku mengikuti keinginan masyarakat sesuai dengan harapan masyarakat dari status atau jabatan itu (Putri *et al.*, 2023). Sejalan dengan pendapat Biddle bahwa teori peran itu memiliki arti *fungisionalisme role theory* (teori peran fungsional) yang memiliki fokus pada peran dan tingkah laku khusus yang dimiliki seseorang karena kedudukan sosialnya dalam sistem sosial yang stabil (Musaddad, 2018)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memiliki peran penting dalam memfasilitasi partisipasi dan pengembangan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan (Nurkomala *et al.*, 2023). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menyediakan layanan seperti akses menuju sumberdaya keuangan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat (Jollystar & Lyimo, 2023). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) memiliki peran yaitu sebagai (1) Fasilitator, yaitu memberikan fasilitas berupa kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. (2) Mediator, yaitu memberikan informasi mengenai hasil rencana pembangunan yang sudah ditetapkan sebagai rancangan pembangunan. (3) Motivator, yaitu membimbing, membina dan mengarahkan masyarakat agar mempunyai nilai yang lebih tinggi, lebih baik, lebih bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. (4) dan dinamisator, yaitu pengawasan dan pemantauan (Mustanir *et al.*, 2022).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai fasilitator, memfasilitasi segala kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan termasuk di dalamnya menampung aspirasi dan mendampingi masyarakat dalam melakukan rencana pembangunan (Mustanir *et al.*, 2022). Setiap Selasa pagi, Pak Panji, ketua LPMK Kelurahan Candi, rutin berjalan-jalan dari pasar Candi hingga ke kantor kelurahan untuk menyapa warga dan menanyakan masalah yang mereka hadapi. Pak Panji aktif berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk membangun hubungan yang kuat antara LPMK dan warga sekitar.

LPMK Kelurahan Candi memiliki program unggulan bernama LikWarDi (Tilik Warga Candi) yang memiliki arti mengunjungi warga Kelurahan Candi. Program LikWarDi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah dan kebutuhan mereka. Program ini dilakukan bergilir antar RW tiga kali dalam seminggu, di mana masyarakat dapat mengungkapkan masalah di lingkungan mereka atau bahkan masalah pribadi. Dengan melakukan kunjungan langsung ke rumah-rumah warga, LPMK dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Adanya kegiatan ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih partisipatif, di mana masyarakat merasa didengar dan memiliki peran aktif dalam pembangunan dan penyelesaian masalah di lingkungan mereka. Dana dkk (2022) berpendapat bahwa LPMK dibentuk dalam rangka menampung, menyerap, serta menyalurkan setiap aspirasi masyarakat.





Gambar 2. Kegiatan LikWarDi

Selain menyediakan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat, LPMK juga memberikan fasilitas berupa dana serta sarana prasarana. Sebelum memberikan fasilitas, LPMK melakukan identifikasi terlebih dahulu berdasarkan aspirasi masyarakat dan kondisi di lapangan. Dengan menempatkan aspirasi masyarakat dan kondisi lapangan sebagai dasar identifikasi, LPMK dapat memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nyata dan relevan dengan situasi lokal. Selain itu, pemberian fasilitas seperti dana dan sarana prasarana dengan memperhatikan skala prioritas akan membantu menghindari pemborosan dan memastikan bahwa proyek yang dipilih memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Sebagai contoh yaitu perbaikan Kamar Mandi dan WC Umum. Selaras dengan pendapat Laila (2022) bahwa pengambilan keputusan didasari oleh kebutuhan dan kepentingan masyarakat melalui aspirasi yang masyarakat sampaikan kepada LPMK.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai mediator berperan sebagai perantara untuk menginformasikan hasil rencana pembangunan yang telah disepakati kepada masyarakat. Mereka menyebarkan informasi tentang berbagai usulan dari rencana pembangunan yang akan dijadikan proyek jangka pendek maupun jangka panjang kepada penduduk, sehingga masyarakat memahami rencana program pembangunan yang akan diterapkan. Anggota LPMK juga bertugas untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan (Cici Nurbaeti et al., 2022).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Candi sebagai mediator memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegiatan yang dilaksanakan melalui *WhatsApp*, selebaran, dan *door-to-door*. Informasi dari LPMK disampaikan ke tingkat RW, kemudian ke RT, dan akhirnya ke masyarakat melalui grup *WhatsApp*. Selain itu, LPMK juga menggunakan media sosial Instagram untuk membagikan informasi. Sosialisasi setelah kegiatan juga dilakukan. Contohnya, saat seminar posyandu yang hanya dihadiri oleh perwakilan PKK dari setiap RW. Kemudian, para peserta yang hadir akan mengadakan sosialisasi mengenai pengetahuan yang telah mereka peroleh dalam pertemuan RT.



Gambar 3. Salah satu media informasi

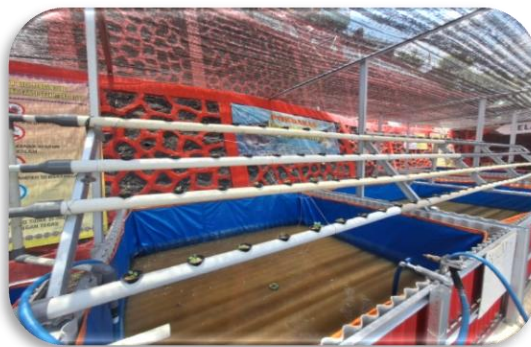
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Candi sebagai motivator harus mampu membimbing, membina, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat agar memiliki keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dalam upaya meningkatkan kreativitas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. LPMK sebagai motivator memiliki poin utama yang harus diperhatikan yaitu kemampuan memahami lingkungan dan kepekaan sosial, kemampuan mengajak, kemampuan memberikan informasi, serta kemampuan menjadi fasilitator (Hamdan *et al.*, 2023).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Candi tidak mengadakan program penyuluhan yang secara khusus bertujuan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Namun, LPMK secara konsisten berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mereka merasa termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan yang lain. Tidak ada strategi khusus yang digunakan untuk memotivasi masyarakat, tetapi LPMK mengadakan kegiatan yang diharapkan menarik minat mereka dan mengundang partisipasi. Pada awalnya, hanya sedikit orang yang tertarik, tetapi seiring waktu, minat masyarakat lainnya juga bertambah sehingga lebih banyak yang ikut serta dalam kegiatan tersebut. Sebagai contoh, pelatihan pembuatan mesin bubut, kegiatan lomba dalam rangka HUT RI ke-78 untuk masyarakat kelurahan Candi dan kegiatan kerja bakti yang dihadiri hampir 500 orang.



Gambar 4. Turnamen olahraga

LPMK Kelurahan Candi bertekad menjadi teladan bagi masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai yang dianutnya. Sebelum mengajukan ide atau inisiatif, LPMK memastikan bahwa mereka sudah melaksanakannya terlebih dahulu. Sebagai contoh, ketika merencanakan program *urban farming*, Ketua LPMK, Mas Panji, secara pribadi terlibat dalam kegiatan tersebut. Tindakan ini bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa LPMK tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak sesuai dengan apa yang mereka usulkan. Selain itu, ketua LPMK bersedia turun langsung ke masyarakat dan berupaya memahami mereka dengan baik. Hal ini menyebabkan masyarakat memberikan penghormatan dan rasa kagum kepada ketua LPMK, sehingga mereka merasa termotivasi untuk ikut serta dalam kegiatan yang diusulkan atau dijalankan oleh LPMK.



Gambar 5. *Urban Farming*

LPMK Kelurahan Candi sebagai dinamisator berkomitmen untuk menghadapi dinamika masyarakat yang berubah dengan pendekatan yang proaktif, yaitu dengan mendekati dan memahami mereka melalui pendengaran dan pemenuhan kebutuhan mereka agar merasa nyaman. Selain itu, LPMK menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran kegiatan. Mereka telah bekerja sama dengan pengusaha lokal, partai politik, instansi pemerintahan seperti Dinas Pembangunan, serta program CSR lainnya yang bersedia membantu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga. LPMK Kelurahan Candi pernah mendapat bantuan dari CSR untuk UMKM berupa 15 meja dan 8 tenda untuk berjualan. Seperti yang disampaikan oleh (Allen *et al.*, 2022) bahwa lembaga kemasyarakatan menerapkan strategi pembangunan ekonomi, nilai sosial, dan kerjasama dengan pihak luar untuk memberdayakan masyarakat.

LPMK Kelurahan Candi sebagai koordinator seluruh lembaga yang ada di kelurahan, memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan kegiatan kemasyarakatan di wilayah tersebut. Keterlibatan LPMK dalam berbagai kegiatan sosial di kelurahan menjadi sangat diperlukan. Oleh karena itu, LPMK memiliki 12 bidang yang bertanggung jawab untuk memantau, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan masyarakat. Sebagai contoh pada bidang keagamaan dimana ada program paguyuban masjid yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan

mengawasi kegiatan peribadatan di Kelurahan Candi. Sejalan dengan pendapat Mohi (2022) bahwa kelembagaan sebagai dinamisator dapat diwujudkan melalui pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap program pembangunan.



Gambar 6. Evaluasi LPMK

LPMK Kelurahan Candi dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat memiliki faktor pendukung dan penghambat yang perlu diperhatikan. Faktor pendukung yaitu 1) Pola kepemimpinan Ketua yang baik. Kepemimpinan yang baik dari ketua LPMK dapat menginspirasi dan memotivasi anggota serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diadakan. 2) Anggota LPMK yang solid. Anggota LPMK yang memiliki kesatuan visi dan misi serta komitmen yang kuat terhadap tujuan organisasi akan memperkuat daya tarik dan kepercayaan masyarakat terhadap LPMK. 3) Bantuan dari mitra. Dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dapat membantu LPMK dalam menyelenggarakan kegiatan dan mencapai tujuan mereka.

Faktor penghambat yaitu 1) Keterbatasan dana. Dana yang dianggarkan pemerintah sebanyak 30 juta per tahun tidak cukup untuk mengakomodasi kegiatan masyarakat. hal ini dapat menghambat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. 2) Perbedaan pendapat dengan masyarakat. ada beberapa masyarakat yang belum sejalan dengan LPMK tetapi hal ini tidak mempengaruhi LPMK dalam menjalankan tugasnya untuk mensejahterakan masyarakat.

## SIMPULAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Candi telah berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan mereka. Awalnya, masyarakat enggan untuk berpartisipasi, namun sekarang mereka telah bersedia berpartisipasi dalam tahap yang disebut *Degrees of tekonism* pada tangga Peredaman (*Placation*). Meskipun belum mencapai tingkat partisipasi tertinggi, hal ini dianggap sebagai pencapaian yang signifikan mengingat upaya LPMK dalam membangkitkan semangat partisipasi masyarakat. Masyarakat telah mencapai tahap *Degrees of tekonism* pada tangga Peredaman (*Placation*) ditandai dengan menyampaikan pendapat mereka dalam perencanaan program, meskipun keputusan akhir masih ditangani oleh LPMK.

Peran LPMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dinilai positif, terbukti dengan penyediaan fasilitas seperti tempat untuk menyampaikan aspirasi, alokasi dana, dan sarana prasarana. Informasi yang komprehensif disampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media online dan offline. Motivasi diberikan melalui kegiatan menarik, pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta menjadi contoh teladan. LPMK juga proaktif dalam menghadapi perubahan dinamika masyarakat, bekerja sama dengan pihak eksternal, dan mengawasi setiap kegiatan untuk memastikan berjalan dengan baik.

Faktor pendukung LPMK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat meliputi kepemimpinan yang baik dari ketua, solidaritas anggota LPMK, dan dukungan dari mitra. Faktor penghambatnya meliputi keterbatasan dana dan beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung visi dan misi LPMK. Untuk mengatasi faktor penghambat, LPMK bisa melakukan 1) Lebih gencar melakukan penggalangan dana melalui kerjasama dengan pihak swasta, pengajuan proposal hibah atau bantuan, pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM 2) LPMK harus konsisten dalam mengadakan kegiatan yang menarik perhatian sehingga masyarakat yang belum sejalan bisa mulai tertarik dan terbiasa dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adet, D. S., Fitryah, N., & Situmorang, L. (2023). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Kampung Keay Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. *EJournal Pembangunan Sosial*, 2023(1), 46–59. <https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/?p=1452>
- Allen, E. M., Frisancho, A., Llanten, C., Knep, M. E., & Van Skiba, M. J. (2022). Community Health Agents Advancing Women's Empowerment: A Qualitative Data Analysis. *Journal of Community Health*, 47(5), 806–813. <https://doi.org/10.1007/s10900-022-01107-2>
- Aprilia, R. Y., & Suharno. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Formulasi RPJM Desa Mantingan Tahun 2020-2025 yang Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 12(02), 204–215. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/20150>
- Arief Rahman. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJurnal Ilmu Pemerintahan*, 2458, 1–12. <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3677>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Apbdes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 173–194. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i2.176>
- Chawa, A. F., Putra, M. H. P., & Saputra, A. R. (2023). Partisipasi Warga pada

- Penanganan Krisis Akibat Pandemi Covid-19 dalam Tangga Partisipasi Arnstein di Bogoarum, Magetan. *Jurnal Kawistara*, 13(1), 34. <https://doi.org/10.22146/kawistara.84329>
- Cici Nurbaeti, O., Ichsana Nur, M., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2022). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Pembangunan Di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2). <http://stp-mataram.e-journal.id/JIH>
- Creswell, J. W. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. In *Mycological Research* (3rd ed., Vol. 94, Issue 4). Pustaka Pelajar.
- Damaiwana. (2020). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Kelurahan Mamasa. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 5. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35329/mitzal.v5i1.1854>
- Dana, I. G. A. S., Ida Ayu Putu Widiati, & I wayan arthanaya. (2022). Eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Mewujudkan Pembangunan Desa di Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2), 324-329. <https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4938.324-329>
- Dewi, L. S., Tan, F., & Nazer, M. (2019). Menapaki Tangga Arnstein Dalam Perencanaan Tata Ruang (Studi Kasus Kecamatan Aua Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi). *Jurnal Spasial*, 6(1), 19-26. <https://doi.org/10.22202/js.v6i1.3318>
- Douglas, H. (2022). Sampling Techniques for Qualitative Research. In *Principles of Social Research Methodology* (pp. 415-426). Springer Nature Singapore. [https://doi.org/10.1007/978-981-19-5441-2\\_29](https://doi.org/10.1007/978-981-19-5441-2_29)
- Felix Júnior, L. A., Costa, W. P. L. B. da, Guimarães, L. G. de A., Pereira, G. R. B., & El-Aouar, W. A. (2020). Social participation in the definition of budgetary instruments. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(5), 737-755. <https://doi.org/10.1108/TG-12-2019-0118>
- Gaber, J. (2019). Building "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association*, 85(3), 188-201. <https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1612267>
- Hamdan, H., Asis, A., & Welson, W. (2023). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mamasa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Mamasa. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 5(2), 423. <https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.4116>
- Hamdani, R. S. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 43-62. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>
- Heffernan, A. (2022). Development, Conservation, Empowerment: The Trilemma of Community-Based Natural Resource Management in Namibia. *Environmental Management*, 69(3), 480-491. <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01589-1>

- Hidayat, A., Lesmana, S., & Latifah, Z. (2022). Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), 6707–6714. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3067090>
- Isyabillillah, E., & Gustaman, F. A. (2023). Implementasi Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Taman Kota Madiun. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.15294/solidarity.v12i1.71445>
- Jollystar, I., & Lyimo, F. F. (2023). The Contribution of Village Community Bank (VICOBA) on women empowerment in Shinyanga Municipality, Tanzania. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VII(V), 574–579. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.70546>
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Rompas, W. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/JAP/article/view/25447>
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*.
- Laia, M., Simbolon, besti rohana, & Giawa, F. (2022). Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd) Terhadap Efektivitas Perencanaan Pembangunan Desa Merdeka Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. 10(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Masri, M. A., Ibrahim, M., & Hadi, M. (2023). Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Desa Payakameng. *AJAD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.59431/ajad.v3i1.149>
- Mohi, W. K., Gintulangi, S. L., & Abdullah, A. (2022). The Existence of Community Empowerment Institutions (LPM) in the Development Plan. *Journal La Sociale*, 3(2), 62–68. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v3i2.594>
- Muarifuddin, M. (2017). Implementasi pembangunan Desa Wisata Batik Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 51. <https://doi.org/10.21831/jppm.v4i1.12713>
- Mulyono, S. E. (2017). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (A. Malik (ed.)). Penerbit Ombak.
- Musaddad, A. (2018). *Annangguru: dalam Perubahan Sosial di Mandar*. <https://books.google.co.id/books?id=TJetDwAAQBAJ&lpg=PR1&hl=id&pg=PR5#v=onepage&q&f=false>
- Mustanir, A., Ibrahim, M., Rusdi, M., & Jabbareng, M. (2022). *Pembangunan Partisipatif Dan Pemberdayaan Masyarakat Implementasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Di Desa*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Nisa, S. L., Nurhadi, E., & Hendrarini, H. (2022). Mengukur Keseriusan Petani Dalam Mengikuti Program Asuransi Usahatani Padi Berdasarkan Tangga Partisipasi Arnstein. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 9(Cvm), 351–361. <https://doi.org/10.25157/jimag.v9i1.6804>

- Nurkomala, N., Diswandi, D., & Fadliyanti, L. (2023). The Role of Community Empowerment Institutions for Village Development. *European Journal of Development Studies*, 3(3), 76–82. <https://doi.org/10.24018/ejdevelop.2023.3.3.268>
- Parida, J., & Emei, D. S. (2019). Pengaruh Strategi Pemberdayaan masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 146–152. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1800/1296>
- Putri, N., Rahman, A., & Alqarni, W. (2023). Analisis Peran Kepala Desa Dalam Menjalankan Program Simpan Pinjam Melalui Bumdes Di Desa Jongar Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, 8(2), 1–13. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/Fisip>
- Ranjamandu, A. R. (2019). Upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 359–366. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/2016>
- Rauf, R., & Munaf, Y. (2018). Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia. *Zanafa Publishing*, 79–82.
- Salmia, Sukmawati, S. (2023). Development Of Quality Instruments And Data Collection Techniques. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar (JPPGuseda)*, 6(1), 119–124. <https://doi.org/10.55215/jppguseda.v6i1.7527>
- Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 251–270. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.197>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta.
- Suryani, P., Jatningsih, I. D., & Putra, E. S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Bendung Misterius Sebagai Objek Wisata. *Jurnal Pariwisata PaRAMA: Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accessibility*, 2(1), 39–48. <https://doi.org/10.36417/jpp.v2i1.447>
- Tampubolon, A. F., Hariyoko, Y., & Soesiantoro, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sedati Sidoarjo (Studi Pelaksanaan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga). *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(4), 27–43. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/998>
- Uddin, N. (2019). Empowerment through participation in local governance: the case of Union Parishad in Bangladesh. *Public Administration and Policy*, 22(1), 40–54. <https://doi.org/10.1108/PAP-10-2018-0002>
- Ulfatin, N. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan: Teori dan Aplikasinya*. Media Nusa Creative.
- Zuldafrial. (2012). *Penelitian Kuantitatif*. Y. Media Perkasa.